

PEMKAB KOBAR BERKOMITMEN LEBIH FOKUS TANGANI STUNTING



Sumber gambar: <https://kalteng.antaranews.com/>

Pangkalan Bun (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah berkomitmen untuk terus berupaya keras menangani kasus stunting di wilayah setempat.

"Dalam penanganan kita harus komprehensif, bukan hanya untuk anak-anak yang sudah stunting, tetapi juga bagi keluarga yang berisiko, agar anak mereka tidak jatuh ke kondisi stunting," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kotawaringin Barat Rody Iskandar di Pangkalan Bun, Senin.

Rody mengatakan, saat ini ada tiga kecamatan yang menjadi fokus Pemkab Kobar dalam penanganan kasus stunting. Tiga kecamatan tersebut yaitu Arut Utara, Arut Selatan dan Kumai.

"Langkah strategis ini diambil dengan harapan dapat menekan prevalensi stunting di Kobar dan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama anak-anak," ucapnya.

Dia mengungkapkan, dalam penanganan stunting pihaknya tidak ingin hanya memperbaiki situasi saja, tetapi juga mencegah agar kasus stunting tidak semakin tinggi.

"Kita sedang mengembangkan pendekatan yang lebih holistik dalam menangani masalah ini, kami optimis bisa mengurangi prevalensi stunting secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan," ungkapnya.

Ada beberapa langkah yang diambil untuk penanganan stunting, di antaranya pemberian edukasi kepada masyarakat tentang gizi, peningkatan akses ke layanan kesehatan ibu dan anak, serta pemenuhan kebutuhan dasar seperti air bersih dan sanitasi yang layak.

Menurutnya, masalah stunting kompleks karena berakar pada berbagai faktor, mulai dari kekurangan asupan gizi pada masa kehamilan, minimnya akses terhadap pangan yang bernutrisi, hingga kondisi ekonomi keluarga.

Rody menyampaikan, melalui sinergi dengan berbagai pihak, Pemkab Kobar berharap dapat mempercepat penurunan angka stunting di wilayah Kobar.

Salah satunya melibatkan kader-kader kesehatan di tingkat desa, menurutnya, kader kesehatan memiliki peran penting terutama dalam memastikan informasi dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

"Stunting bukan hanya sekedar masalah kesehatan, tetapi juga menyangkut masa depan anak-anak dan generasi mendatang," disampaikannya.

Dia menambahkan, Pemkab Kobar juga menggalakkan program pemberian makanan tambahan bergizi untuk ibu hamil dan balita.

Pada program tersebut melibatkan penyediaan bahan pangan lokal yang bernutrisi, agar ibu hamil dan balita dapat terpenuhi kebutuhan gizinya secara optimal.

"Dengan tekad dan komitmen yang tinggi, kita berharap langkah ini mampu memberikan dampak yang signifikan dalam menurunkan angka stunting di Kobar," demikian Rody Iskandar.

Sumber Berita:

1. <https://kalteng.antaranews.com/berita/728221/pemkab-kobar-berkomitmen-lebih-fokus-tangani-stunting>, Selasa, 12 November 2024.
2. <https://prokalteng.jawapos.com/pemerintahan/pemkab-kotawaringin-barat/11/11/2024/diperkirakan-1-400-anak-rentan-stunting-pemkab-kobar-terus-perkuat-upaya-pencegahan/>, Senin, 11 November 2024.
3. <https://kobar.inews.id/read/518024/pemkab-serius-tekan-angka-stunting-di-tiga-kecamatan-di-kobar>, Senin, 11 November 2024.

Catatan:

Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* menyatakan bahwa *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Lebih lanjut dalam Pasal 10 Peraturan Presiden tersebut menjelaskan dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan *stunting* Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam penyelenggaraannya mengacu pada Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*. Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:

- a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. peningkatan kualitas pelaksanaan;

- c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.